panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
SPBE



2022

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN

PEMERINTAH KAB. LUWU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil pemantauan dan evaluasi SPBE tahun 2022 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu. Selain itu, pemantauan dan evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE tahun 2022 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 31 Januari 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
NIP. 197208081996032001

PEMANTAUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2022

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2022, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE yang dilakukan pada tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Pemantauan ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian Pemantauan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri dan penilaian dokumen.

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses	
1. Rintisan	Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan proses tata kelola dilaksanakan secara *ad-hoc*.
2. Terkelola	Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi
3. Terstandardisasi	Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi
4. Terintegrasi dan Terukur	Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif
5. Optimum	Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi Teknis	
1. Informasi	Layanan SPBE dalam bentuk satu arah
2. Interaksi	Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah
3. Transaksi	Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan
4. Kolaborasi	Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan lain
5. Optimalisasi	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal

PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2022

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	**13%**
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	**25%**
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	**16,5%**
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	**45,5%**
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik	18%

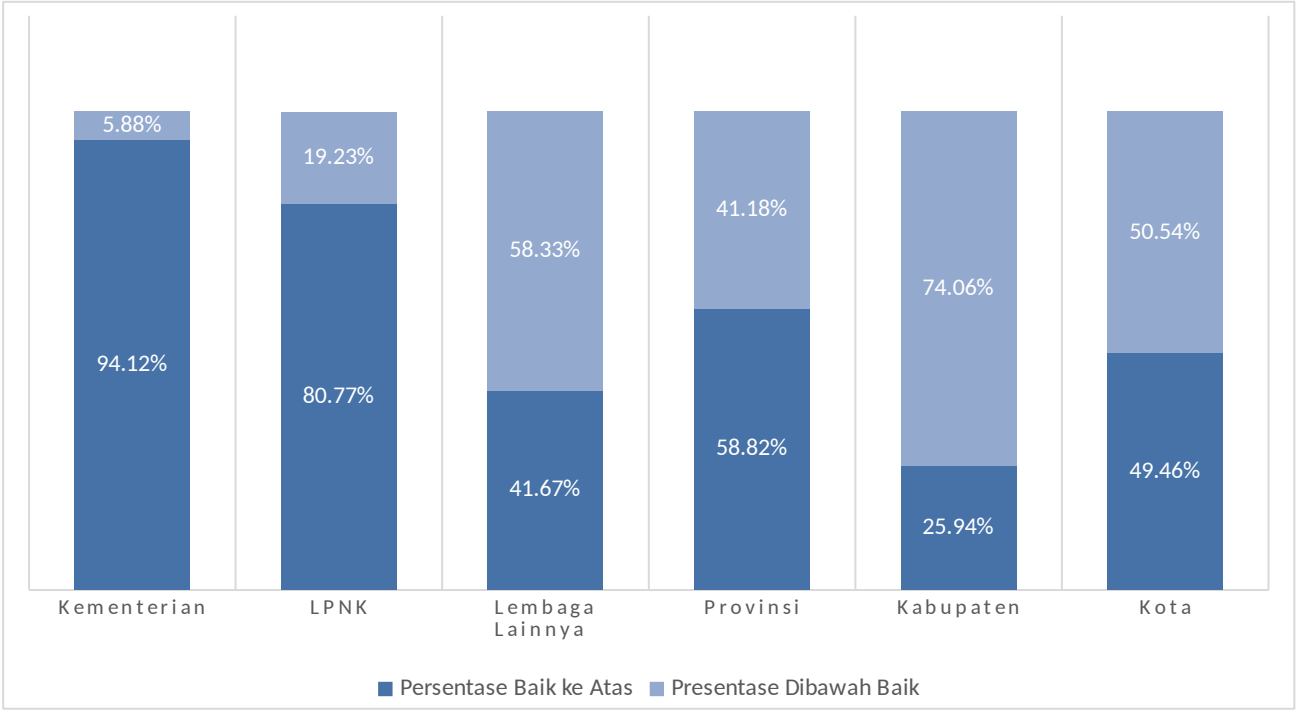
Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,35	3,14	2,92	2,33	2,74	2,17	2,50
Domain Kebijakan	2,39	3,08	2,88	2,39	2,69	2,23	2,61
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,39	3,08	2,88	2,39	2,69	2,23	2,61
Domain Tata Kelola	1,85	2,86	2,59	1,94	2,27	1,64	1,98
Perencanaan Strategis	1,70	2,63	2,33	1,90	2,00	1,53	1,70
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,92	2,93	2,77	2,04	2,40	1,68	2,11
Penyelenggaraan SPBE	2,02	3,16	2,75	1,83	2,57	1,78	2,28
Domain Manajemen	1,32	2,01	1,64	1,36	1,51	1,21	1,36
Penerapan Manajemen SPBE	1,35	2,14	1,62	1,37	1,55	1,23	1,41
Audit TIK	1,24	1,66	1,69	1,34	1,38	1,15	1,23
Domain Layanan SPBE	2,97	3,72	3,58	2,86	3,45	2,79	3,18
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.03	3,71	3,58	3,07	3,46	2,85	3,23
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,89	3,74	3,58	2,55	3,44	2,71	3,09

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2022

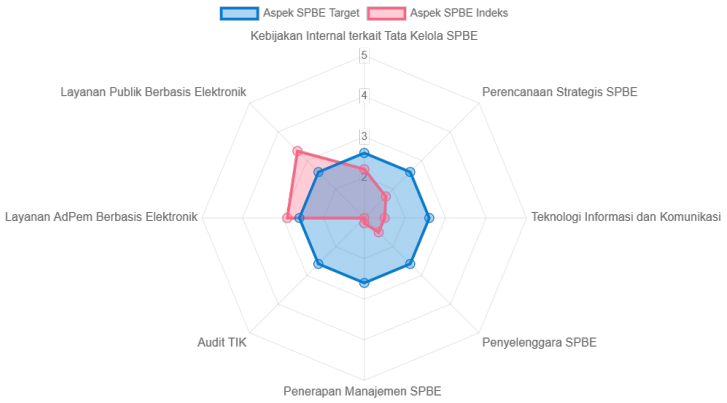


INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. LUWU

2,26

(Cukup)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2022
SPBE	**2,26**
Domain Kebijakan SPBE	2,20
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	*2,20*
Domain Tata Kelola SPBE	1,60
Perencanaan Strategis SPBE	*1,75*
Teknologi Informasi dan Komunikasi	*1,50*
Penyelenggara SPBE	*1,50*
Domain Manajemen SPBE	1,09
Penerapan Manajemen SPBE	*1,13*
Audit TIK	*1,00*
Domain Layanan SPBE	3,07
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	*2,90*
Layanan Publik Berbasis Elektronik	*3,33*

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2021	Nilai Tingkat Kematangan 2022
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	2	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	2	2
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	2	2
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2	2
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	2	2
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem	2	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan	2	2
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	2	2
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	2	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1	1
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2	1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	2	2
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2	2
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1	1
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	3	2
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	3	2
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara /	3	2
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3	2
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	2	2
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2	2
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	2	4

45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	2	2